

PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PADANGGUNI KABUPATEN KONAWE

KUSRAWAN

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lakidende
choesraone@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial yaitu transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dimana sampel berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 dari 6 Desa yang berada di Kecamatan padangguni. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara angket kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni; 2) transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni; 3) kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni; 4) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni; 5) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni

Kata Kunci : Transparansi; Kompetensi; Sistem Pengendalian Internal; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Akuntabilitas

ABSTRACT

This study aims to determine the effect simultaneously and partially, namely transparency, competence, internal control systems and the use of information technology on village government accountability in the management of village funds. The sampling technique used in this study was to use a purposive sampling technique wherein the sample came from a source that was deliberately chosen based on criteria set by the researcher, so that the sample in this study was as many as 105 out of 6 villages in Padangguni District. Data collection techniques were carried out by questionnaire questionnaire. Data analysis uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that: 1) transparency, competence, internal control systems

271

and the simultaneous use of information technology have a positive and significant effect on village government accountability in managing village funds in Padangguni District; 2) transparency has a positive and significant effect on village government accountability in managing village funds in Padangguni District; 3) competence has a positive and significant effect on village government accountability in managing village funds in Padangguni District; 4) the internal control system has a positive and significant effect on the accountability of the village government in managing village funds in Padangguni District; 5) the use of information technology has a positive and significant effect on the accountability of the village government in managing village funds in Padangguni District

Keywords: *Transparency, Competence, Internal Control Systems, Utilization of Information Technology, Accountability*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah memposisikan Desa sebagai fokus utama pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di sektor Desa yaitu dengan pemberian dana Desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran pedesaan.

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di bidang pembangunan terutama peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di jajaran Desa dapat dilihat dari tingkat kenaikan dana Desa yang diberikan pemerintah kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Semenjak awal tahun 2016 dana desa telah dinaikkan jumlahnya menjadi Rp. 46,9 Triliun atau dua kali lipat lebih besar dibanding 2015 yang hanya sebesar Rp. 20,7 Triliun. Dari adanya kenaikan jumlah pengalokasian dana Desa maka setiap Desa akan mengelola uang atau dana Desa secara mandiri sebesar Rp. 500 Juta hingga Rp. 800 Juta per Desa.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari APBN dikemukakan bahwa dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan yaitu sebesar 90% dari dana Desa dialokasikan secara merata ke setiap desa dan 10% dihitung dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir dalam rangka untuk menyempurnakannya.

Riyanto (2015), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. (Cheng *et al.*, 2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengendalian dalam pemerintahan, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut. Ditambahkan oleh Uddin dan Hopper (2001) bahwa pimpinan dalam sebuah organisasi memiliki bentuk pengendalian agar dalam sistem perencanaan (penganggaran desa) output yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa. Pengamatan peneliti di lapangan khususnya di pemerintah Desa tingkat akuntabilitas dan transparansi masih sangat rendah. Hal ini didukung dengan temuan yang dipaparkan oleh Indonesia Aksi-Corruption Forum (IACF 2010) yang menyebutkan potensi-potensi penyalahgunaan dana Desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Desa dan sistem pengendalian intern.

Selain itu kompetensi sumber daya manusi yang memadai, namun jika tidak didukung dengan teknologi informasi belum tentu dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human error* (Karmila, 2010). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali dan Supomo, 2002).

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Teknologi

informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Di sisi lain berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 pemerintah Desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa dana yang diberikan ke masing-masing Desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah Desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di Desa masing-masing.

Anggaran dana desa sebesar Rp. 46,9 Triliun yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya Undang-Undang tentang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat menyeret para kepala desa berikutnya ke penjara. Secara umum pemerintah Desa masih belum bisa mengalokasikan dana Desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Di Kecamatan Padangguni misalnya, berdasarkan pengamatan peneliti pengetahuan masyarakat terutama pemerintah Desa di daerah tersebut masih minim dalam mengelola keuangan dana Desa. Kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah Desa terkait pengelolaan dana Desa masih belum mampu mengelola dana tersebut. Dengan variatifnya karakteristik Desa, kompetensi aparat desa dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kepala Desa. Melainkan karena ketidak pahaman para kepala Desa dalam memanfaatkan anggaran.

Anggaran desa yang diperoleh oleh setiap pemerintah desa yang cukup besar tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Karena menurut pendamping Desa untuk wilayah di Kecamatan mungkin untuk penata usaha dana Desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah. Sehingga diperlukan peran perangkat Desa untuk membantu kepala Desa dalam mengelola dana Desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana Desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala Desa dan aparat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari APBN dikemukakan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung

berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan yaitu sebesar 90% dari dana desa dialokasikan secara merata ke setiap Desa dan 10% dihitung dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Konsep Akuntabilitas

Hadi (2006:150), akuntabilitas adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta serta masyarakat memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan. Haris (2007:349) bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial, dan program”.

Mardiasmo (2006:3) mengemukakan “akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

Dalam pasal 7 Undang-Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud “asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah bentuk kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep Transparansi

Didjaja (2003:261), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat”.

Mardiasmo (2006), “transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat”. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat;
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah;
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Kristianten (2006:31) “transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintah. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sebuah bentuk tindakan/sikap yang dilakukan seseorang atau kelompok yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan.

Konsep Kompetensi

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi merupakan karakteristik dari orang-orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melakukan tugas (Heevesi, 2005:9). Sedangkan menurut Robbins (2007:38) bahwa kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Wibowo (2007) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan keahlian seseorang dalam melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kompetensi

Handoko (2006:122) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi sumber daya manusia yaitu:

1. Keyakinan dan nilai-nilai

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.

2. Keterampilan

Keterampilan memainkan peran kompetensi. Pengembangan kompetensi secara spesifik berkaitan dengan budaya organisasi dan kompetensi individual.

3. Pengalaman

Pengalaman juga sangat diperlukan dalam kompetensi. Diantaranya pengalaman dalam mengorganisasi orang, berkomunikasi dihadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dsb.

4. Aspek-aspek kepribadian (*Personal Attributes*)

Merupakan kompetensi intrinsik individu tentang bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. *Personal attribute* merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan.

5. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat dirubah. Dengan memberikan dorongan dan apresiasi terhadap pekerjaan yang dia kerjakan.

6. Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

7. Kemampuan intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Salah satu faktor seperti pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi

Konsep Sistem pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Romney *et al.* (2014) mengemukakan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Mengamankan aset-mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan atau penempatan yang tidak sah.
2. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar.
3. Memberikan informasi yang akurat dan reliabel.
4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.
6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan.
7. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Hall (2009) mengungkapkan bahwa ketidakberadaan atau kelemahan pengendalian internal sering disebut sebagai *eksposure* dan dapat mengekspose perusahaan ke satu atau lebih jenis resiko:

1. Penghancuran aktiva (baik fisik maupun informasi),
2. Pencurian aktiva,
3. Kerusakan informasi atau sistem informasi,
4. Gangguan sistem informasi

Konsep Pemanfaatan Teknolgi Informasi

Haryanto (2012), Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi.

Halim (2002), Teknologi informasi memiliki lima fungsi pokok yaitu mengumpulkan data, pengolahan data, pelaporan data, penyimpanan data, dan pengiriman data.

Hamzah (2009) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan

publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Teddy Jumali (2002) dalam Diana (2008) pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

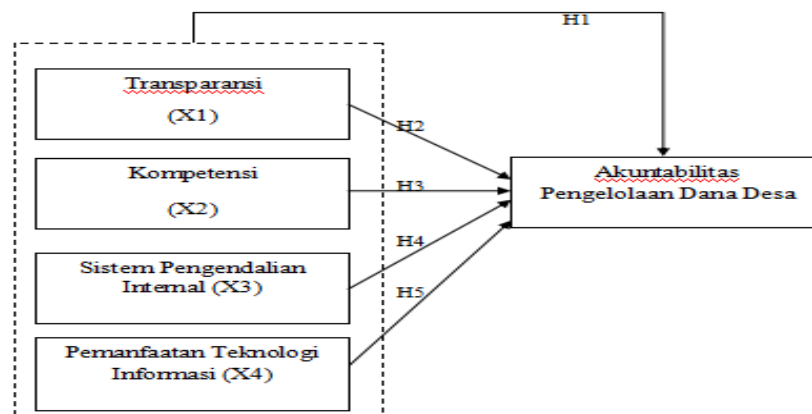
Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah seseorang yang menggunakan teknologi untuk mempermudah mengolah data dan tugas lain yang diberikan kepadanya.

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.
- H2 : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.
- H3 : Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.
- H4 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.
- H5 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritik



METODE

Singarimbun dalam Swasono (2011), Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *explanatory Research* dengan pendekatan kuantitatif. *Explanatory Research* adalah penelitian yang menjelaskan kausal antara variabel-variabel melalui

pengujian hipotesis, uraiannya mengandung deskripsi tetapi fokusnya pada hubungan antar variabel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe yang terdiri dari aparatur Kecamatan, aparatur Desa, masyarakat dan badan pengawas pengelolaan dana Desa. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Sugiyono (2011:85) *Purposive Sampling* adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria-kriteria yang di gunakan dalam penarikan sampel yaitu: Aparatur kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat; dan Badan pengawas pengelolaan dana Desa.

Jumlah Sampel Penelitian

No	Kriteria sampel	Jumlah	Sampel
1	Camat Padangguni	1	1
2	Sekretaris Camat	1	1
3	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	1
4	Kepala desa	1	6
5	Sekretaris Desa	1	6
6	Badan Permasyarakatan Desa	1	6
7	Tim Pengelola Kegiatan	3	18
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1	6
9	Masyarakat	10	60
Jumlah			105

PEMBAHASAN

Dari hasil uji regresi berganda diperoleh koefisien regresi, nilai t_{hitung} dan tingkat signifikansi sebagaimana ditampilkan pada tabel-tabel diatas. Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda disajikan pada tabel 4.17 sebagai berikut:

Pengujian hipotesis 1

Tabel 4.17
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel bebas	Koefisien regresi	T_{hitung}	Signifikan	Ket.
Transparansi (X1)	0,273	2,454	0,016	Signifikan
Kompetensi (X2)	0,310	3,899	0,000	Signifikan
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,142	2,131	0,036	Signifikan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	0,270	3,107	0,002	Signifikan
Konstanta (a) = 0,282 dengan t signifikan 0,712				
R square = 0,868				
R = 0,932 ^a				
F hitung = 164,983				
F signifikan = 0,000				
Standar error = 0,704				
Signifikansi = *0,01 **0,05 ***0,10				

Sumber : data primer diolah Tahun 2019.

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa: Transparansi (X₁), Kompetensi (X₂), Sistem Pengendalian Internal (X₃), dan Pemanfaatan teknologi Informasi (X₄) berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa (Y). berdasarkan hasil uji F yang disajikan dalam tabel 4.16 di atas, variabel transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Hal ini karena nilai F hitung $> F$ tabel ($164,983 > 2,46$) atau signifikansi $< 0,05$ dimana nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ sehingga (H_0) ditolak dan (H_1) diterima.

Nilai Fhitung positif berarti transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat dijadikan acuan pemerintah di Kecamatan Padangguni untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa pada Desa-desa yang berada di Kecamatan Padangguni. Artinya jika semakin tinggi tingkat transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan pula akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni, begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi maka semakin rendah pula tingkat akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni.

Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa: transparansi (X_1) berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa (Y). berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.15 diatas, transparansi memiliki thitung sebesar 2,454 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukan bahwa thitung lebih besar dari pada ttabel ($2,454 > 1,660$) dengan nilai signifikansi ($0,016 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. dengan kata lain hipotesis (H_2) diterima.

Nilai thitung positif berarti transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Kristianten (2006:31) yang mengemukakan bahwa transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintah. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakn akan berjalan efektif.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh muhammad rosyidi (2018), dimana hasil yang diperoleh bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa

Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa: Kompetensi (X_2) berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa (Y). berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.15 diatas, transparansi memiliki thitung sebesar 3,899 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari pada ttabel ($3,899 > 1,660$) dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa. Dengan kata lain hipotesis (H_3) diterima.

Nilai thitung positif berarti transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. Artinya semakin banyak aparatur Desa yang memiliki kompetensi di dalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana Desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Frinki dan Klimoski, (2004:14) yang mengemukakan bahwa Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh muhammad rosyidi (2018), dimana hasil yang diperoleh bahwa Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa

Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa: Sistem pengendalian internal (X_3) berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa (Y). berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.15 diatas, transparansi memiliki thitung sebesar 2,131 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,817. Hal ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari pada ttabel ($2,131 > 1,660$) dengan nilai signifikansi ($0,036 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Dengan kata lain hipotesis (H_4) diterima

Nilai thitung positif berarti sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aikins (2011) bahwa pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan.

Sistem Pengendalian Internal dalam Pemerintahan merupakan faktor yang penting, disebabkan dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Rosyidi (2018), dimana hasil yang diperoleh bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa.

Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa: Pemanfaatan teknologi informasi (X_4) berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa (Y). Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.15 di atas, pemanfaatan teknologi informasi memiliki t hitung sebesar 3,107 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel ($3,107 > 1,660$) dengan nilai signifikansi ($0,002 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa. Dengan kata lain hipotesis (H_5) diterima. Nilai t hitung positif berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. Artinya bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur Desa dalam pengelolaan dokumen-dokumen Desa secara keseluruhan sehingga aparatur Desa mampu untuk mengimput data secara lebih cepat dari pada menggunakan cara manual.

Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyudi (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun tidak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. Artinya transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat pula meningkatkan akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pula pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.
3. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. Artinya semakin banyak aparatur Desa yang memiliki kompetensi didalam

- bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.
4. Sistem pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pememrintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. Artinya sistem pengendalian internal menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah.
 5. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pememrintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. Artinya bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur Desa dalam pergelolaan dokumen-dokumen Desa secara keseluruhan sehingga aparatur Desa mampu untuk mengimput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual

SARAN

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah variable lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta memperluas wilayah objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahmasari, I. A., dan Agus, S, 2008. *Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan*. Tesis Universitas 17 Agustus Surabaya.
- Clifford, McCue., and Gerasimos, A. Gianakis, 1997. “*The Relationship Between Job Satisfaction and Performance: The Case of Local Government Finance Officer in Ohio*”. *Public Productivity and Management Review*, Vol. 21 No. 2, p.170–191.
- Ghozali, Imam, 2011. *Struktural Equation Modeling: model alternatif dengan Partical Least Square (PLS)*. Undip: Semarang.
- Gibson, James L., J, Ivancevich, M. & Donnelly, J. H, 2007. *Organisasi. Edisi Kedelapan. Alih Bahasa Djakarsih*. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.
- Herzberg, F, 1959. *The Motivation to Work*. New York: John Wiley and Sons.
- Harish, Sujana, Barton A Weitz, & Nirmalya Kumar, 1994. “*Learning Orientatation, Working Smart, and Effective Selling*”. *Journal of Marketing*, Vol 58, July 1994.
- Indrawan, Puji, Tony., dan Nurkhayati, Isnaini, 2011. *Analisis kerja cerdas, kerja keras dan umpan balik supervisi Dalam meningkatkan kinerja penjualan*. (Studi Kasus Pada Agen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Semarang Timur Branch Office). *Teknis* vol. 6 no.1 april 2011: 46 – 54.
- Leong, Siew Meng, Donna M. Randall, dan Joseph A. Cote, 1994. “*Exploring the Organizational Commitment Performance Linkage in Marketing: a Study of Life Insurance Salespeople*”. *Journal of Business Research*, Vol. 29, pp. 57 – 63.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

- Muslih, Basthoumi, 2012. “*Analisis Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai di PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional III Malang*”. *Jurnal Aplikasi Manajemen* / Volume 10 / Nomor 4 / Desember 2012.
- McShane, Stevan L and Mary Ann Von Glinow, 2010. *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Noermijati. 2008. *Aktualisasi Teori Herzberg, Suatu Kajian Terhadap Kepuasan dan Kinerja Spiritual Manajer Operasional (Penelitian di Perusahaan Kecil Rokok Sigaret Kretek Tangan di Wilayah Malang)*. Disertasi Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Noermijati. 2010. *Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 8 Nomor 1 Februari 2010 (Kajian Deskriptif Tentang Kondisi Faktor Intrinsik dan Ekstrinsik serta Kepuasan Kerja Manajer Menengah-Bawah)*. Malang: Penerbit Percetakan (UM Press).
- Robbins, Stephen, P. 2008. *Perilaku Organisasi Edisi Kedua Belas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduwan, 2007. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Pegawai dan Peneliti Pemula*, Cetakan Keenam. Bandung: Alfabeta.
- Sujan. H, Barton. A. Weitz and Nirmalya Kumar, 1994. *Learning Orientation, Working Smart and Effective Selling*. *Journal of Marketing*, Vol.58, 39-52.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P, 1984. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Gunung Agung. Jakarta.
- Widyastuti, Endang, N, 2004. *Analisis Pengaruh Iklim Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Variabel Intervening Kepuasan Kerja*. Tesis Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Semarang.
- Weitz, BA, Sujan H, dan Sujan M, 1986. *Knowledge, Motivation, Adaptive Behaviour: A Framework for Improving Selling Effectiveness*”. *Journal of Marketing*, Vol. 50 (Oktober), pp. 174 – 191.
- Widodo. 2010. “*Efek Moderasi Kerja Cerdas Pada Pengaruh Kompetensi, Reward, Motivasi Terhadap Kinerja*”. *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2010, pp: 125-136.
- Wibowo. 2011. *Manajemen kinerja, edisi-3*. Jakarta: Rajawali Pers. Qomar, Mujamil. 2007. *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: Erlangga